

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 095.02.1.452646/2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
 - 2. Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
 - 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 - 4. Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 - Sebesar : Rp. 999.456.319.000 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	999.456.319.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN JAKARTA VII (182) Rp. 999.456.319.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

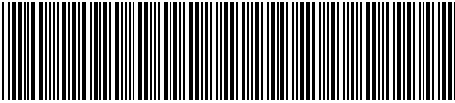
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025

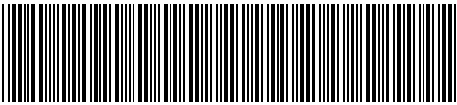


DS:6495-0401-5813-1091

Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH

CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Rp.	684.300.805.000
CF.3858	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD	Rp.	48.840.000.000
CF.3863	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD	Rp.	93.522.342.000
CF.3864	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	Rp.	537.488.463.000
CF.3962	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah	Rp.	2.325.000.000
CF.3963	Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum	Rp.	2.125.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	315.155.514.000
WA.6383	Pengelolaan Keuangan Keanggotaan DPD dan Operasional Persidangan dan Rapat-rapat	Rp.	315.155.514.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
I A. INFORMASI KINERJA



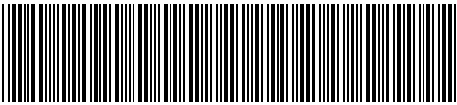
DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Halaman : I A. 1

Program	:	095.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan			684.300.805.000
Kegiatan	:	3858	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD			48.840.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Dukungan Sidang dan Rapat di Lingkup Biro Sekretariat Pimpinan			
		2. 01	Tingkat Kepuasan Pimpinan DPD RI Terhadap Layanan Biro Sekretariat Pimpinan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	3858.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan	48.840.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Pemasyarakatan Keputusan DPD RI	5,00	kegiatan	37.008.265.000
		02	AEA.002 Pertemuan/Konsultasi	5,00	kegiatan	11.831.735.000
Kegiatan	:	3863	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD			93.522.342.000
	:	1. 01	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang yang disusun di lingkup Biro Persidangan I terhadap draft rancangan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I			
		2. 01	Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang lingkup Biro Persidangan I yang disusun di lingkup Biro Persidangan I terhadap draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I			
		3. 01	Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang disusun di lingkup Biro Persidangan I terhadap total draft hasil peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I			
		4. 01	Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Persidangan I			
		5. 01	Tingkat kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Biro Persidangan I			
		6. 02	Rasio draft hasil Pandangan pendapat serta pertimbangan yang disusun di lingkup Biro Persidangan I terhadap draft rancangan Undang-Undang dan pandangan serta pertimbangan yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	3863.AAA	Undang-Undang	22,00	UU, RUU	71.895.802.000
Rincian Output	:	01	AAA.001 RUU USUL TUGAS KOMITE I	1,00	RUU	11.864.822.000
		02	HASIL PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD RI ATAS RUU TERTENTU (KOMITE I)	1,00	RUU	11.385.992.000
		03	HASIL PENYUSUNAN PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU (KOMITE I)	6,00	UU	15.449.052.000
		04	RUU USUL TUGAS KOMITE III DPD RI	1,00	RUU	10.091.628.000
		05	HASIL PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN	1,00	RUU	279.560.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
I A. INFORMASI KINERJA

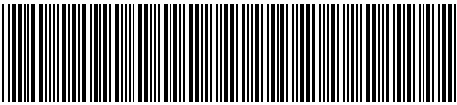


DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Undang-Undang				UU, RUU	
			PERTIMBANGAN DPD RI ATAS RUU TERTENTU	1.00	RUU
06	AAA.006		HASIL PENYUSUNAN PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU	5.00	UU 9.580.702.000
07	AAA.007		USUL PROLEGNAS DPD RI	1.00	RUU 1.642.145.000
08	AAA.008		RUU USUL TUGAS PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DPD RI	1.00	RUU 9.332.054.000
09	AAA.009		KONSEP RUU	4.00	RUU 543.200.000
10	AAA.010		UU HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN DPD RI	1.00	UU 1.726.647.000
Klasifikasi Rincian Output	3	: 3863.AAH	Peraturan lainnya	1.00	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan 409.050.000
Rincian Output		: 01	AAH.001 Peraturan lainnya	1.00	peraturan 409.050.000
Klasifikasi Rincian Output	4	: 3863.ABC	Kebijakan Bidang Politik	5.00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian 7.499.481.000
Rincian Output		: 01	ABC.001 PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN DAERAH	2.00	Rekomendasi Kebijakan 5.579.410.000
		: 02	ABC.002 PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN ATAS PERMINTAAN DAERAH TENTANG PERMASALAHAN HUKUM DI DAERAH	1.00	Rekomendasi Kebijakan 1.227.545.000
		: 03	ABC.003 MONITORING TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA	2.00	Rekomendasi Kebijakan 692.526.000
Klasifikasi Rincian Output	5	: 3863.AEA	Koordinasi	22.00	kegiatan 4.216.587.000
Rincian Output		: 01	AEA.001 PERSIDANGAN DAN MATERI DALAM LINGKUP BIRO PERSIDANGAN I	2.00	kegiatan 1.880.000.000
		: 02	AEA.002 RUU TERTENTU HASIL PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH)	3.00	kegiatan 563.619.000
		: 03	AEA.003 RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH LINGKUP TUGAS KOMITE I	8.00	kegiatan 639.816.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
I A. INFORMASI KINERJA

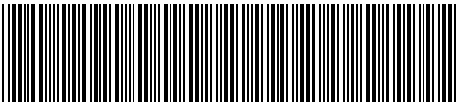


DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Koordinasi			kegiatan		
04	AEA.004	RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH LINGKUP TUGAS KOMITE III	8.00	kegiatan	508.270.000
05	AEA.005	DISEMINASI HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA / PERDA	1.00	kegiatan	624.882.000
Klasifikasi Rincian Output 6	:	3863.AEC Kerja sama	3.00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	9.501.422.000
Rincian Output	:	01 AEC.001 KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	3.00	Kesepakatan	9.501.422.000
Kegiatan	:	3864 Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI			537.488.463.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01 Rasio total draft hasil Pertimbangan anggaran DPD RI yang disusun terhadap Total Draft hasil Pertimbangan Anggaran yang direncanakan			
		2. 01 Rasio total draft hasil Rancangan Undang-Undang yang disusun di lingkup Biro Persidangan II terhadap total draft rancangan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan II			
		3. 01 Rasio total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang disusun di lingkup Biro Persidangan II terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan II			
		4. 01 Tingkat Kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelenkapan terhadap layanan Biro Persidangan II			
		5. 01 Tingkat kepuasan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Persidangan II			
		6. 02 Rasio total draft hasil pandangan pendapat serta pertimbangan yang disusun di lingkup Biro Persidangan II terhadap total draft pandangan pendapat serta pertimbangan yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan II			
		7. 02 Rasio total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi DPD RI yang disusun terhadap total Draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendas yang direncanakan di Lingkup Biro Persidangan II			
Klasifikasi Rincian Output 7	:	3864.AAA Undang-Undang	20.00	UU, RUU	56.077.091.000
Rincian Output	:	01 AAA.001 RUU USUL TUGAS KOMITE II DPD RI	1.00	RUU	11.089.278.000
		02 AAA.002 HASIL PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD RI ATAS RUU TERTENTU (KOMITE II)	1.00	RUU	1.251.237.000
		03 AAA.003 HASIL PENYUSUNAN PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU (KOMITE II)	5.00	UU	12.003.061.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
I A. INFORMASI KINERJA

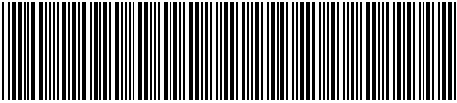


DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Undang-Undang				UU, RUU		
	04	AAA.004	RUU USUL TUGAS KOMITE IV DPD RI	1.00	RUU	9.850.756.000
	05	AAA.005	PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD RI ATAS RUU TERTENTU BIDANG KOMITE IV	4.00	RUU	7.773.658.000
	06	AAA.006	HASIL PERTIMBANGAN DPD RI ATAS HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	2.00	UU	6.452.408.000
	07	AAA.007	HASIL PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU BIDANG KOMITE IV	5.00	UU	7.488.343.000
	08	AAA.008	PERTIMBANGAN DPD RI ATAS CALON ANGGOTA BPK	1.00	UU	168.350.000
Klasifikasi Rincian Output	8	3864.ABC	Kebijakan Bidang Politik	14,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	20.588.400.000
Rincian Output	01	ABC.001	REKOMENDASI ATAS TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHAN YANG DISAMPAIKAN PEMDA	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.993.392.000
	02	ABC.002	REKOMENDASI ATAS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI YANG BERINDIKASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.823.208.000
	03	ABC.003	KEBIJAKAN NON RUU/UU PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.771.800.000
	04	ABC.004	KEBIJAKAN PANITIA URUSAN RUMAH TANGGA (PURT)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	11.000.000.000
	05	ABC.005	PANMUS/PANSUS DPD RI	4.00	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	3864.AEA	Koordinasi	17,00	kegiatan	8.882.341.000
Rincian Output	01	AEA.001	PERSIDANGAN DAN MATERI DALAM LINGKUP BIRO PERSIDANGAN II	2.00	kegiatan	1.880.000.000
	02	AEA.002	RUU TERTENTU HASIL PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH)	2.00	kegiatan	4.853.058.000
	03	AEA.003	RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH LINGKUP TUGAS KOMITE II	5.00	kegiatan	1.098.195.000
	04	AEA.004	RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH LINGKUP TUGAS KOMITE IV	8.00	kegiatan	1.051.088.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
I A. INFORMASI KINERJA

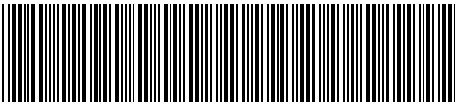


DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Klasifikasi Rincian Output	10	:	3864.BLA	Persidangan Lembaga Legislatif	1,00	sidang	6.756.232.000	
Rincian Output		:	01	BLA.001	SIDANG TAHUNAN DPD	1.00	sidang	6.756.232.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	3864.BMB	Komunikasi Publik	38,00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	445.184.399.000	
Rincian Output		:	01	BMB.001	ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH OLEH ANGGOTA DPD RI	38.00	layanan	445.184.399.000
Kegiatan		:	3962	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah			2.325.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Rasio hasil penelitian dan kajian yang disusun terhadap total penelitian dan kajian yang direncanakan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran				
			2. 01	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang disusun oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang direncanakan				
			3. 01	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran				
Klasifikasi Rincian Output	12	:	3962.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	4,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	273.100.000	
Rincian Output		:	01	ABA.001	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN NEGARA	4.00	Rekomendasi Kebijakan	273.100.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	3962.ABC	Kebijakan Bidang Politik	15,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	276.350.000	
Rincian Output		:	01	ABC.001	DUKUNGAN DATA DAN MATERI TERKAIT KEWENANGAN ALAT KELENGKAPAN	15.00	Rekomendasi Kebijakan	276.350.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	3962.PBC	Kebijakan Bidang Politik	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.775.550.000	
Rincian Output		:	01	PBC.001	PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH (PN)	5.00	Rekomendasi Kebijakan	1.775.550.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH

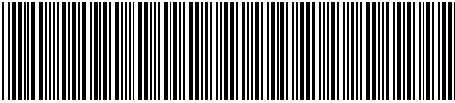
Halaman : I A. 6

Kegiatan	:	3963	Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum				2.125.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Rasio total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan terhadap total penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundangan-undangan yang direncanakankan					
		2. 01	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum					
Klasifikasi Rincian Output	15	:	3963.ABC	Kebijakan Bidang Politik		6,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.225.000.000
Rincian Output	:	01	ABC.001	RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM		4,00	Rekomendasi Kebijakan	614.360.000
		02	ABC.002	KEBIJAKAN DAN INFORMASI HUKUM		2,00	Rekomendasi Kebijakan	610.640.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	3963.BMA	Data dan Informasi Publik		5,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	900.000.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	TATA KELOLA JDIH		1,00	layanan	561.865.000
		02	BMA.002	INFORMASI KEBIJAKAN HUKUM		2,00	dokumen	189.175.000
		03	BMA.003	LAPORAN KINERJA LEMBAGA DPD RI DAN LAPORAN SEKRETARIAT JENDERAL		2,00	dokumen	148.960.000
Program	:	095.02.WA	Program Dukungan Manajemen				315.155.514.000	
Kegiatan	:	6383	Pengelolaan Keuangan Keanggotaan DPD dan Operasional Persidangan dan Rapat-rapat				315.155.514.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Realisasi Pembayaran Gaji Anggota DPD RI dan Hak keuangan staf ahli dan staf administrasi Pimpinan dan Anggota DPD RI					
		2. 02	Realisasi Layanan Operasional Persidangan dan Rapat-Rapat					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6383.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	315.155.514.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran		1,00	Layanan	315.155.514.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal DPD RI

ttd.
Dr. Rahman Hadi, M.Si
NIP 196909141990031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
I B. SUMBER DANA



DS:6495-0401-5813-1091

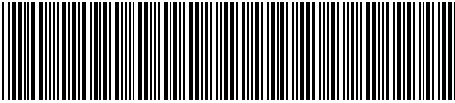
Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	999.456.319.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	999.456.319.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

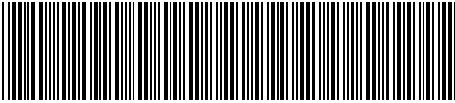


DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
452646	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	296.557.387	702.898.932	-	-	-	999.456.319	01 . 51 182@ 182@ 182@	
095.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	-	684.300.805	-	-	-	684.300.805		
3858	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD	-	48.840.000	-	-	-	48.840.000		
3858.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	48.840.000	-	-	-	48.840.000		
01	RM	-	48.840.000	-	-	-	48.840.000		
3863	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD	-	93.522.342	-	-	-	93.522.342		
3863.AAA	Undang-Undang (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	71.895.802	-	-	-	71.895.802		
01	RM	-	71.895.802	-	-	-	71.895.802		
3863.AAH	Peraturan lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	409.050	-	-	-	409.050		
01	RM	-	409.050	-	-	-	409.050		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



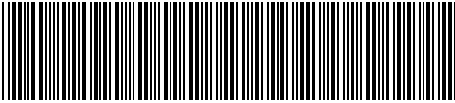
DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3863.ABC	Kebijakan Bidang Politik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.499.481	-	-	-	7.499.481	01 . 51	
01	RM	-	7.499.481	-	-	-	7.499.481	182@	
3863.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.216.587	-	-	-	4.216.587	01 . 51	
01	RM	-	4.216.587	-	-	-	4.216.587	182@	
3863.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.501.422	-	-	-	9.501.422	01 . 51	
01	RM	-	9.501.422	-	-	-	9.501.422	182@	
3864	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	-	537.488.463	-	-	-	537.488.463		
3864.AAA	Undang-Undang (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	56.077.091	-	-	-	56.077.091	01 . 51	
01	RM	-	56.077.091	-	-	-	56.077.091	182@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



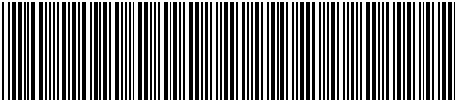
DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3864.ABC	Kebijakan Bidang Politik	-	20.588.400	-	-	-	20.588.400	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	20.588.400	-	-	-	20.588.400	182@	
3864.AEA	Koordinasi	-	8.882.341	-	-	-	8.882.341	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	8.882.341	-	-	-	8.882.341	182@	
3864.BLA	Persidangan Lembaga Legislatif	-	6.756.232	-	-	-	6.756.232	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	6.756.232	-	-	-	6.756.232	182@	
3864.BMB	Komunikasi Publik	-	445.184.399	-	-	-	445.184.399	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	445.184.399	-	-	-	445.184.399	182@	
3962	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah	-	2.325.000	-	-	-	2.325.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



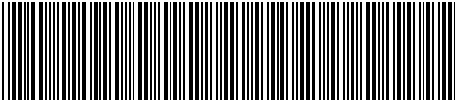
DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3962.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	-	273.100	-	-	-	273.100	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	273.100	-	-	-	273.100	182@	
3962.ABC	Kebijakan Bidang Politik	-	276.350	-	-	-	276.350	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	276.350	-	-	-	276.350	182@	
3962.PBC	Kebijakan Bidang Politik	-	1.775.550	-	-	-	1.775.550	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	1.775.550	-	-	-	1.775.550	182@	
3963	Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum	-	2.125.000	-	-	-	2.125.000		
3963.ABC	Kebijakan Bidang Politik	-	1.225.000	-	-	-	1.225.000	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	1.225.000	-	-	-	1.225.000	182@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3963.BMA	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	900.000	-	-	-	900.000	01 . 51	
01 RM		-	900.000	-	-	-	900.000	182@	
095.02.WA	Program Dukungan Manajemen	296.557.387	18.598.127	-	-	-	315.155.514		
6383	Pengelolaan Keuangan Keanggotaan DPD dan Operasional Persidangan dan Rapat-rapat	296.557.387	18.598.127	-	-	-	315.155.514		
6383.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	296.557.387	18.598.127	-	-	-	315.155.514	01 . 51	
01 RM		296.557.387	18.598.127	-	-	-	315.155.514	182	
JUMLAH		296.557.387	702.898.932	-	-	-	999.456.319		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal DPD RI

ttd.
Dr. Rahman Hadi, M.Si
NIP 196909141990031004

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah

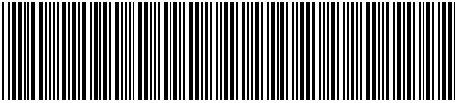
Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : (095) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : (02) Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (452646) DEWAN PERWAKILAN DAERAH

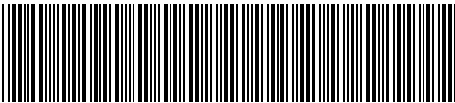
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
095.02.WA.6383		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	177.071	177.071	177.071	177.071	177.071	177.071	177.071	177.071	177.071	177.071	177.071	177.219	2.125.000
		Pengelolaan Keuangan Keanggotaan DPD dan Operasional Persidangan dan Rapat-rapat	26.262.932	26.262.932	26.262.932	26.262.932	26.262.932	26.262.932	26.262.932	26.262.932	26.262.932	26.262.932	26.262.932	26.263.262	315.155.514
		51 BELANJA PEGAWAI	24.713.089	24.713.089	24.713.089	24.713.089	24.713.089	24.713.089	24.713.089	24.713.089	24.713.089	24.713.089	24.713.089	24.713.408	296.557.387
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.549.843	1.549.843	1.549.843	1.549.843	1.549.843	1.549.843	1.549.843	1.549.843	1.549.843	1.549.843	1.549.843	1.549.854	18.598.127

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal DPD RI

ttd.
Dr. Rahman Hadi, M.Si
NIP 196909141990031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
IV A. B L O K I R



DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : [095] DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : [02] Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [452646] DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
452646	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	3863.AAA	Undang-Undang
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 131.849.938		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
095.02.CF	52 Belanja Barang Rp. 131.849.938		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.466.016
	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
3858	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Koordinasi		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
3858.AEA	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.409.037
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.606.069		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.736.531
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.100		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.601.866
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 87.855		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	3863.AAH	Peraturan lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.925
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.783.200		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 149.550
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.538.313		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	3863.ABC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Bidang Politik
3863	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 196.975

[illegible]

Kementerian Negara/Lembaga : [095] DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Unit Organisasi : [02] Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [452646] DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3863.AEA	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	3864	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 241.341
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 481.856		524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.384.474
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.385.338		Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Undang-Undang
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Koordinasi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.878.308
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.056.194	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 713.138		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 135.825	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.962.721		
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 170.125	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.822.887		
3863.AEC	Kerja sama	3864.ABC	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 185.161	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.131.792		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			

[illegible]

Kementerian Negara/Lembaga : [095] DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Unit Organisasi : [02] Dewan Perwakilan Daerah

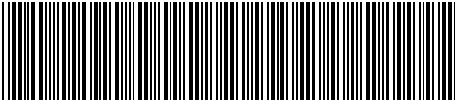
Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [452646] DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3864.AEA	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	3864.BMB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 247.350
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 199.915		Komunikasi Publik
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.102.150
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.809.384		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		3962 Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		3962.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	3962.ABC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 96.815
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.128.370	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
3864.AEB	Koordinasi		Kebijakan Bidang Politik
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.302.113		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.600
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		3962.PBC Kebijakan Bidang Politik
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 226.735		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 49.425	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 158.276	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	3864.BLA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.500
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
3864.BLA	Persidangan Lembaga Legislatif		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
IV A. B L O K I R



DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : [095] DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : [02] Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [452646] DEWAN PERWAKILAN DAERAH

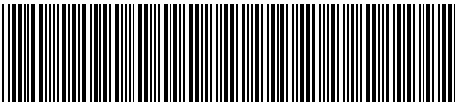
Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3963 3963.ABC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 273.250 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.325 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 260.375 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 277.281 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum		
	Kebijakan Bidang Politik		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.852 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.280 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 88.800 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 189.070 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Data dan Informasi Publik		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.475 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal DPD RI

ttd.
Dr. Rahman Hadi, M.Si
NIP 196909141990031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 095.02.1.452646/2025
IV B. C A T A T A N



DS:6495-0401-5813-1091

Kementerian Negara/Lembaga : [095] DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Unit Organisasi : [02] Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [452646] DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal DPD RI

ttd.
Dr. Rahman Hadi, M.Si
NIP 196909141990031004